

PELATIHAN ANALISIS BIAYA PRODUKSI UMKM DI DESA WRINGINSONGO

Ahmad Jarnuzi¹⁾, Annisa Fitriana²⁾, Apit Miharso³⁾, Bakhrudin⁴⁾,
Fathimatus Zahro Fazda Oktavia⁵⁾

¹Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang
email: ahmad.jarnuzi@yahoo.com

²Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang
email: aninis08@yahoo.com

³Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang
email: miharsoapit@yahoo.com

⁴Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang
email: baharrudh@yahoo.co.id

⁵Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang
email: fathimatuszfoktavia@polinema.ac.id

Abstract

This PPM is held to reformulate the determination of the basic water tariff on the clean water management unit that is part of BUMDes Desa Wringinsongo, a method used with a qualitative approach where the team identifies the problem of the partner, then determines the objectives, reformulates and implements the partner. PPM results recommend the use of water account applications as well as admin fee of Rp.1000

Keywords: basic tariff of water, BUMDes, water account application

1. PENDAHULUAN

Peningkatan upaya untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan mempengaruhi perkembangan ekonomi mikro dan makro daerah, yang kemudian secara agregat akan mendorong perkembangan ekonomi nasional. Berbagai data telah menjustifikasi peran UMKM dalam pembangunan perekonomian nasional dan daerah, baik yang berkaitan dengan segi penyerapan tenaga kerja, perbaikan struktur ekonomi daerah dan nasional, serta kontribusinya terhadap pendapatan wilayah (PDB/PDRB).

Dalam beberapa hal, Jawa Timur dapat dikategorikan sebagai miniatur Negara Indonesia jika ditinjau dari kesamaan beberapa struktur perekonomiannya. Penggerak utama sektor ekonomi Jatim adalah sektor perdagangan, industri, dan pertanian. Sektor perdagangan Jatim menyumbang sekitar 30% PDRB (produk domestik regional bruto), diikuti sektor industri (27%), dan pertanian (15%). Struktur yang hampir sama juga terjadi pada ekonomi

nasional, di mana sektor perdagangan memberikan donasi lebih kecil (14%), industri 24%, dan pertanian 14% terhadap PDB (produk domestik bruto).

Sektor pertanian Jatim merupakan kisah hebat yang berperan sebagai penyangga pangan nasional. Gula, beras, jagung, kedelai, dan daging merupakan sebagian produk pertanian Jatim yang menjadi penyumbang terbesar pertanian nasional. Sampai 2012 padi Jatim menyumbang 17,5% produksi nasional, sedangkan jagung (31,6%), kedelai (40,4%), kacang tanah (29,8%), dan ubi kayu (14,7%) [BPS dan Deptan, 2012; dalam Yustika, 2013]. Kemudian dari segi ukuran usaha, skala UMKM di Jawa Timur mampu menjadi motor penggerak pembangunan perekonomian Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan dengan peranan UMKM di dalam pembentukan PDRB yang mencapai sekitar 53% atau sekitar Rp 415,7 triliun. Peranan yang strategis di dalam perekonomian ini sejalan dengan peningkatan jumlah UMKM di Jawa Timur yang mencapai sekitar 4,2 juta UMKM. Dari jumlah tersebut sekitar, 85% merupakan usaha mikro, 14% merupakan

usaha kecil, dan sekitar 1% merupakan usaha menengah dan besar.

Pengabdian kepada masyarakat sangatlah penting demi memajukan kesejahteraan masyarakat. Pada era globalisasi ini, masyarakat diharuskan mengikuti perkembangan zaman modern seperti sekarang ini. Sehingga dapat serta meningkatkan kehidupan yang layak, contohnya seperti mendapatkan sumber air bersih yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari.

Begitu pula yang terjadi pada Desa Wringinsongo, yang merupakan sebuah desa di wilayah Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Memiliki jarak tempuh 43 KM dari pusat Ibukota Kabupaten Malang (Kepanjen) dan 20 km dari pusat Kota Malang, Desa Wringinsongo memiliki beberapa potensi kewilayahan karena memiliki beberapa sumberdaya alam yang mumpuni, serta berkembangnya UMKM di Desa Wringinsongo seperti kripik papaya, bumbu pecel, anyaman bamboo serta yang tidak kalah viral ada UMKM yang menjual jemblem dengan penjualan yang fantastis.

Desa wringinsongo merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desa Wringinsongo yang secara tipologi wilayahnya terbentang dan memanjang dari timur ke barat dengan luas wilayah +126.98 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Batas Utara: Desa Sukoanyar

Batas Selatan: Desa Bokor dan Tumpang

Batas Timur: Desa Malangsuko dan Jeru

Batas Barat: Desa Slamet dan Sukoanyar

Secara administratif Desa Wringinsongo terbagi menjadi 2 dusun yaitu Sumberingin dan Longkosongo yang terbagi lagi menjadi 19 RW dan 35 RT, yang mana masing-masing RT dikepalai oleh pejabat RT yang disebut dengan Ketua RT.

Penelitian ini dilakukan di Dusun Sumberingin dikarenakan titik sumber mata air berada di daerah tersebut. Dengan jumlah penduduk 3.186 jiwa yang terdiri dari 798 KK dengan jumlah usia produktif yang cukup besar yaitu 42,3%, Desa Wringinsongo dapat melakukan pengembangan Bersama UMKMnya.

Desa Wringinsongo memiliki Badan Usaha Milik Desa dimana salah satu unit

bisnisnya adalah pengelolaan air bersih. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah banyaknya tunggakan akibat dirasa penentuan tarif air memberatkan warga sekitar. Saat ini unit pengelola air bersih memberikan tarif Rp. 1000,00/m³, namun jika pemakaian dibawah 10/m³/bulan, maka pelanggan air dikenakan tarif minimal yaitu sebesar Rp. 10.000,00. Disinilah ketimpangan terjadi karena justru pengguna air / pelanggan air dengan penggunaan kurang dari 10/m³ / bulan adalah tergolong warga yang kekurangan (janda yang tidak memiliki pekerjaan tetap).

Oleh karena itu, tujuan PPM ini adalah memperbaiki unit bisnis pengelolaan air bersih dalam menentukan tarif dasar air yang merupakan bagian dari BUMDes. Analisis kelayakan ekonomi dibutuhkan agar tarif air bersih berkeadilan, baik bagi warga desa maupun bagi BUMDes. Selain itu mengoptimalkan harga pengadaan air bersih juga untuk meningkatkan pelayanan namun tetap mempertimbangkan keadaan ekonomi masyarakat (Linati (2015); Saraswati (2017)). Disamping memperhatikan profit karena unit bisnis tersebut harus menghasilkan profit, namun pengelola juga memperhatikan prinsip kemanusiaan. Dengan permasalahan ketimpangan yang terjadi seperti yang telah disebutkan diatas, maka saran solusi dari tim pengabdian adalah menghitung ulang berdasarkan teori penentuan tarif dasar air dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang terjadi dalam proses menjalankan unit bisnis tersebut. Kemudian tim pengabdian juga melakukan klusterisasi atau penggolongan penggunaan air, mulai dari penggunaan 0-10 m³. Dengan penggunaan dasar teori penentuan harga jual, maka tim pengabdian dapat memberikan masukan terhadap pengelola BUMDes khususnya unit pengelola air bersih dalam memasukkan masukan-masukan tersebut pada AD/ART yang dapat menjadi landasan hukum bagi pengelola dalam melakukan penetapan tarif sesuai dengan perhitungan wajar dan akademis. Selain itu, tim pengabdian juga memberikan masukan penggunaan system

yang dapat memudahkan pencatatan keuangan atau penarikan air bersih

METODE

Program kegiatan PPM ini rencananya dilaksanakan pada bulan Juli 2021. Pemilihan waktu akan dikoordinasikan dengan beberapa UMKM di Desa Wringinsongo atas rekomendasi aparat desa setempat. Oleh karena itu, sebelum melakukan justifikasi UMKM mana saja yang tergolong kedalam solusi permasalahan yang akan dikemukakan oleh tim, maka kami akan melakukan konsultasi dengan pemerintah desa atau penanggung jawab pada mitra kami yaitu Desa Wringinsongo. Pelaksanaan PPM akan direncanakan dengan protocol covid yaitu 3M sehingga kelompok UMKM yang diundang berkisar 10 orang / kelompok dan juga kami memperhatikan ruangan yang tersedia.

Namun pemerintah telah mengumumkan pada bulan Juli 2021 bahwa daerah Malang Raya termasuk daerah yang harus melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga tim pengabdian mematuhi peraturan pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan diluar. Maka kegiatan ini dapat terlaksana pada akhir bulan Agustus 2021 dimana Kota Malang mulai mengalami penurunan level PPKM dari level 4 ke level 3 yang menandakan tingkat kasus yang ada di Kota Malang menurun.

Metode Pelaksanaan Kegiatan

Program pelatihan yang akan dilaksanakan sebaiknya direncanakan dengan matang sehingga hasilnya sesuai dengan harapan. Untuk dapat menghasilkan program pelatihan yang sesuai dengan harapan tersebut, maka Tim PPM Politeknik Negeri Malang menerapkan langkah-langkah yang sistematis dalam menyusun perencanaan pelatihan, Langkah-langkah sistematis yang perlu dilakukan dalam perencanaan pelatihan seperti berikut:

A. Analisis Kebutuhan Pelatihan

1. Analisis kebutuhan pelatihan di tingkat ini berusaha mengetahui tujuan yang ingin dicapai oleh tim PPM dengan adanya pelatihan dan pendampingan.

Analisis individu ini mengupayakan untuk menjawab pertanyaan tentang siapa yang memerlukan pelatihan dan jenis pelatihan apa yang dibutuhkan. Untuk itu perlu dilihat pengetahuan, kemampuan dan keterampilan apa yang dikuasainya, serta sikap dan perilaku kerja yang bagaimana yang ia miliki. Jadi analisis pada tingkat ini difokuskan pada kebutuhan mengenai urgensi perhitungan HPP. Setelah tim melakukan survey awal, tim PPM menemukan bahwa unit pengelola air bersih membutuhkan pengarahannya untuk tarif air serta pencatatannya.

Proses analisis kebutuhan pelatihan memerlukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pengumpulan data, yang diperoleh melalui aktivitas pengisian angket, wawancara, observasi dan kegiatan lainnya dengan tujuan mengumpulkan data yang sesuai dengan maksud dan tujuan analisis kebutuhan pelatihan.

Menyusun Desain Pelatihan

Apabila tahap analisis pelatihan telah selesai dan urutan prioritas pelatihan telah ditentukan maka tahap selanjutnya adalah menyusun desain pelatihan, yaitu merencanakan program pelatihan sesuai dengan urutan prioritas pelatihan tersebut. Dengan ditemukannya permasalahan mitra terutama terkait unit pengelola air bersih untuk mereformulasi tarif dasar air serta pencatatan yang lebih mudah dipahami (dengan menggunakan system), maka tim PPM Menyusun dua hal sebagai output kegiatan yaitu reformulasi tarif dasar air serta pencatatan dengan aplikasi rekening air.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Eksisting

Pembayaran air yang dimanfaatkan masyarakat dari sumber mata air sebesar 1000/m³, untuk pemakaian air dibawah 10 m³, tetap membayar sebesar Rp10.000, dan jika pemakaiannya habis diatas 10 m³, nominal pembayarannya juga sama. Pemanfaatan fasilitas air bersih ini tidak menarik iuran administrasi. Setiap tanggal 20 hingga akhir bulan dilakukan pengecekan meteran, dan per tanggal 1 bulan berikutnya melakukan pembayaran. Penarikan iuran tersebut dari beberapa RW pada dua desa

tersebut. Permasalahan keterlambatan pembayaran banyak terjadi pada RW sebelah. Sumber air bersih yang dimiliki oleh Dusun Sumberingin memiliki 5 Pengurus, dengan mendapatkan gaji dari Bunga desa sebesar 30% dari pendapatan. Sebagai rinciannya berikut ini:

Admin 10% = Untuk 1 orang teknik

Admin 20% = Untuk 4 orang dimana

masing-masing dikenakan 6-7% dari pendapatan

Berdasarkan referensi yang didapatkan dari daerah lain, untuk membantu mengelola air di RW. Sebagai gambaran, daerah tersebut perbulan memperoleh *revenue* pendapatan sebesar 7-8 juta di dalam 1 RW yang memiliki 200 Kartu Keluarga. Pemasangan air bersih tersebut dikenakan biaya admin sebesar Rp3000/bulan pada setiap pelanggan. Meskipun instalansi awal menggunakan ADB, tetapi tetap membutuhkan penghasilan tambahan untuk membantu pemeliharaan perbulan kebutuhan yaitu biaya listrik dan admin.

Administrasi berada di Balai RW dan dibuka loket dari tanggal 1-10 setiap bulannya. Bagaimana jika masyarakat akan lebih susah untuk membayar? Sedangkan, saat *door to door* saja masih sulit membayar apalagi menggunakan aplikasi? Dengan adanya pembagian level. Dimana setiap adanya kenaikan pemakaian akan dikenakan level berikutnya yaitu membayar biaya kompensasi. Maka dari itu, didasari oleh banyaknya jumlah pemakaian.

- Rekomendasi:

Berdasarkan permasalahan tersebut, diusulkan menginstall sebuah Aplikasi untuk mempermudah pengaksesan, dengan cukup membayar sebesar Rp300.000 untuk seumur hidup, yang dapat diinstall menggunakan komputer. Jika penginstallan dilakukan dari *handphone*, per tahun akan dikenakan biaya lebih tinggi yang membutuhkan biaya perawatan dengan ratusan ribu rupiah serta adanya minimal jumlah pelanggan harus 1000. Jadi, Sistemnya per bulan akan ada yang merekap meterannya habisnya berapa per tanggal 15-20 setiap bulannya. 10 Hari berikutnya, admin akan menginput ke dalam aplikasi tersebut dan setiap tanggal 1 akan dilakukan pembukaan loket kembali.

Penginputan dan perekapan dapat dibantu orang dan tidak butuh komunikasi yang lebih, Tetapi hal tersebut tetap membutuhkan *door to door* untuk melihat meterannya.

Dibutuhkan perhitungan dalam menentukan tarif dasar, dengan Rumus sebagai berikut:

$$\text{Tarif Dasar} = \frac{\text{Seluruh Biaya}}{\text{Jumlah Pelanggan}}$$

Keterangan:

Seluruh Biaya = Biaya Listrik, admin, dan lain-lain

Jumlah Pelanggan = 200 orang

Rincian biaya:

Biaya Listrik = 450.000/bln

Biaya Administrasi 30% = 30% x Pendapatan Perbulan (2.500.000) = 750.000

Berdasarkan data yang tim PPM himpun dari hasil wawancara dan data sekunder berupa pencatatan yang masih sangat konvensional dan sederhana dari pengurus. Hasil yang didapatkan adalah berupa :

Tabel rekap penggunaan debit air oleh pelanggan di Dusun Wringinsongo

Pemakaian :	Jumlah Pelanggan	
	Maret	April
0-10	86	75
11-20	71	76
21-30	31	32
>30	19	24

Dari tabel diatas terlihat sekira 40% pelanggan merupakan pelanggan dengan penggunaan antara 0-10 m³. Sekitar 35% pelanggan dengan penggunaan air sebesar 11-20 m³, 15% nya adalah pelanggan dengan penggunaan air sebanyak 21-30 m³ dan sisanya sebanyak sekitar 10% dengan pemakaian diatas 30 m³.

Rencana kluster dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok I yang terdiri dari pengguna air dibawah 10 m³. Dari informasi yang didapatkan dari petugas bahwa pelanggan yang menggunakan air dibawah 10 m³ adalah warga yang tinggal sendirian (janda, atau orang tua tunggal yang sudah tua), kemudian kelompok II terdiri dari pelanggan dengan penggunaan air 11-20 dan 21-30 m³, dan kelompok III terdiri dari pelanggan dengan penggunaan air diatas 30 m³

Berikut tabel ringkasan pengelompokan pengguna air.

Kelompok	Pemakaian	Biaya admin	Jumlah pelanggan
I	0-10 m ³	0	80an
II	11-20 m ³ dan 20-30 m ³	1000	100an
III	>30 m ³	2000	20an

Jika rata-rata pengguna air dengan biaya admin sebanyak 100, maka total dana yang dapat dihimoun adalah $100 \times 1000 = \text{Rp.}100.000$ perbulan, dan $20 \times 2000 = \text{Rp.}40.000$.

Rata-rata pendapatan yang dapat diperkirakan adalah

1. Pengguna air kelompok I dengan iuran sekitar $\text{Rp.} 5000 \times 80 = \text{Rp.} 400.000$
2. Pengguna air kelompok II dengan iuran sekitar $\text{Rp.} 15.000 \times 100 = \text{Rp.} 1.500.000 + \text{Rp.}100.000$
3. Pengguna air kelompok III dengan iuran sekitar $\text{Rp.} 40.000 \times 20 = \text{Rp.} 800.000 + \text{Rp.} 40.000$

Maka pendapatan yang diperoleh tetap dikisaran $\text{Rp.} 3.000.000$ seperti yang didapatkan selama ini, namun dengan asumsi keadilan untuk penetapan di kelompok I dimana pada kelompok I hana perlu membayar tarif dasar air.

- Harapan

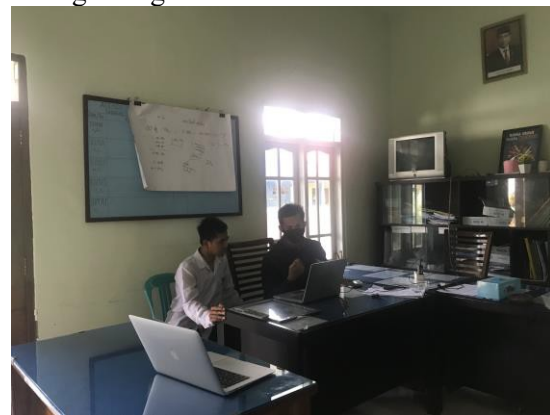
Penyusunan peraturan desa diperjelaskan untuk pembayaran admin, Batasan Pengelola siapa saja, serta Batasan Pelanggan.

Dalam proses survey lapang yang kami lakukan, permasalahan yang tak kalah penting yaitu pada sisi pencatatan. Unit usaha air bersih tersebut merasa para pelanggan banyak yang memiliki tunggakan. Permasalahan berikutnya muncul Ketika pencatatan yang dimiliki tidak cukup memadai untuk menampung atau mengatasi permasalahan tunggakan yang dimiliki para pelanggan. Seperti catatan yang tidak jelas, bulan berapa nunggak dan berapa. Maka tim Pk Mini memberikan masukan terkait penggunaan aplikasi rekening air.

Kelebihan dari aplikasi rekening air ini dirancang untuk pengolahan air yang dikelola swadaya masyarakat di suatu desa atau kelurahan tertentu. Suatu unit pengolahan

yang komoditasnya air menggunakan *software* atau aplikasi rekening air ini untuk mendata pelanggan, mendata golongan pelanggan serta harga air per meter kubiknya, beban, sumbangan, input meteran air yang digunakan pelanggan, cetak tagihan, pembayaran pelanggan, cetak bukti pembayaran/nota pembayaran rekening air, serta rekap data pembayaran.

Gambar 1. Diskusi dan pelatihan analisis biaya pada unit pengelola air di Dusun Wringinsongo.



Fitur pada aplikasi atau *software*

Data Golongan – digunakan untuk mendata golongan pelanggan.

Data Pelanggan – digunakan untuk mendata pelanggan saluran air.

Input Meter – digunakan untuk melakukan pencatatan data meteran pelanggan.

Tagihan – daftar tagihan yang harus dibayar pelanggan serta daftar tagihan yang sudah dibayar. Data muncul dari data meter yang telah diinput.

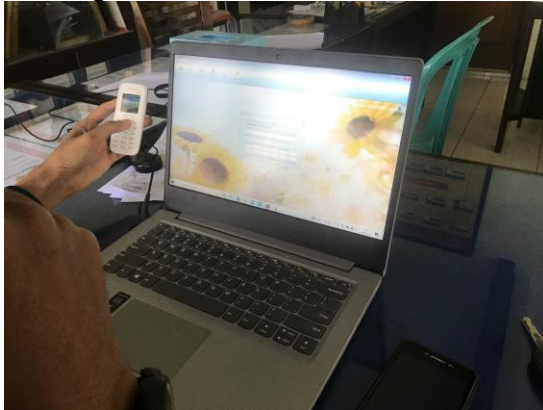
Pembayaran – digunakan untuk transaksi pembayaran tagihan pelanggan.

Daftar Pembayaran – digunakan untuk melihat rekap pembayaran pelanggan.

SIMPULAN

Dalam perumusan rekomendasi yang dilakukan oleh tim PPM menghasilkan bahwa penentuan tarif dasar air sebesar $\text{Rp.} 1000$, namun ada biaya administrasi yang harus disesuaikan dengan pelanggan, serta untuk mengatasi permasalahan dari sisi pencatatan, tim PPM merekomendasikan penggunaan aplikasi rekening air.

Gambar 2. Hasil Pelatihan berupa aplikasi rekening air.



SIMPULAN

Dalam perumusan rekomendasi yang dilakukan oleh tim PPM menghasilkan bahwa penentuan tarif dasar air sebesar Rp. 1000, namun ada biaya administrasi yang harus disesuaikan dengan pelanggan, serta untuk mengatasi permasalahan dari sisi pencatatan, tim PPM merekomendasikan penggunaan aplikasi rekening air.

DAFTAR REFERENSI

- Permendagri 71/2016, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum”. Jakarta
- Linati, R. (2015), “Analisis Harga Air di PDAM Kota Malang terhadap Kenaikan Biaya Produksi”. Malang
- Saraswati, G. (2017), “Konsep Biaya Modal dan Perhitungannya”
- Istichori, Wiguna, Al Masduqi. (2019). Analisis Penentuan Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Lamongan berdasarkan Prinsip Full Cost Recovery. ITS Journal of Civil Engineri